

Dukungan Pemangku Kepentingan Dan Jaringan Dalam Organisasi Layanan Publik

Oleh:

¹ **Beatus Tambaip;** ² **Alexander Phuk Tjilen**

^{1,2} Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Musamus

Email.beatus@unmus.ac.id

Abstrak

Kesenjangan antara pemberian pelayanan kepada publik, karena organisasi ternyata tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dikomunikasikan secara eksternal melalui berbagai kegiatan, kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan pelayanan yang diterima, hal ini karena tidak terpenuhinya harapan public. Tujuan penelitian ini untuk menjawab tinjauan Teori dari Dukungan Pemangku Kepentingan dan jaringan dalam Organisasi Layanan Publik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada teori atau model yang dijadikan rujukan dalam pengumpulan data, yang selanjutnya diverifikasi atau dikonfirmasi dengan data data lapangan. Fokus penelitian ini adalah kompleksitas dalam governance network yang dijelaskan dari Struktur dalam organisasi dan Koordinasi dalam jaringan. Hasil penelitian bahwa kelangsungan hidup organisasi hanya dapat dipastikan dengan mengamankan tingkat independensi sebesar mungkin dari pemangku kepentingan yang selalu berubah. Kebutuhan untuk mengelola ketergantungan lingkungan menjadi semakin penting karena batas antara organisasi dan pemangku kepentingan mereka menjadi semakin kabur di sektor publik menuju bentuk-bentuk jaringan tata kelola dan pemberian layanan telah menjadi hal yang sangat penting. Pergeseran ke arah pengorganisasian kebijakan dan layanan di sektor publik seputar gagasan pemerintahan telah meningkatkan minat dalam jaringan manajerial. Dalam organisasi pemberian layanan, aktivitas jaringan ini biasanya ditujukan untuk mengukir ruang relasional yang diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

Kata Kunci: Pemangku Kepentingan; Jaringan; Organisasi Layana Publik

Abstract

The gap between the provision of services to the public, because the organization is not able to fulfill the promises that have been communicated externally through various activities, the gap between the expectations of the community and the reality of the service received, this is because the expectations of the public are not fulfilled. The purpose of this study is to answer the theory review. from Stakeholder Support and Networking in Public Service Organizations. The approach used in this study is a qualitative approach. The selection of this method is based on a theory or model that is used as a reference in data collection, which is then verified or confirmed with field data. The focus of this research is the complexity in the governance network which is explained from the structure within the organization and the coordination in the network. The research results that organizational survival can only be ensured by securing the greatest possible degree of independence from ever-changing stakeholders. The need to manage environmental dependencies is becoming increasingly important as the boundaries between organizations and their stakeholders become increasingly blurred in the public sector towards forms of governance networks. governance and service delivery has become of paramount importance. The shift towards organizing policies and services in the public sector around the idea of governance has increased interest in managerial networks. In service delivery organizations, these networking activities are usually aimed at carving out the relational space needed to continuously improve service quality.

Keywords: Stakeholders; Networks; Public Service Organization

PENDAHULUAN

Setiap organisasi menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam hal pengembangan kapasitas saat ini. Organisasi harus terus beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Setiap organisasi sekarang harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Berbeda dengan penjelasan konvensional, seleksi alam menjelaskan proses perubahan organisasi. Menurut teori ketergantungan sumber, kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya dalam proses politik pengambilan keputusan internal menentukan kelangsungan hidup organisasi. Menurut Teori Ketergantungan Sumber Daya, sebuah organisasi dapat mencapai kesuksesan dengan meminimalkan atau memaksimalkan ketergantungannya pada sumber daya organisasi lain. Menurut teori ini, organisasi memiliki kekuatan dalam hubungannya dengan lingkungan, melayani kebutuhan elemen-elemen ini, dan memiliki monopoli atas kemampuan tersebut (Wiedner and Ansari 2019).

Koalisi didasarkan pada kemungkinan bahwa ketergantungan yang meningkat dapat menyebabkan peningkatan kekuasaan (Khaw et al. 2022). Teori ketergantungan sumber daya menyatakan bahwa organisasi terus-menerus mencari kontrol atas sumber daya eksternal yang dimiliki oleh aktor dan organisasi lain di lingkungan mereka untuk meminimalkan ketergantungan mereka pada entitas ini. Dengan mengurangi ketergantungan sumber daya mereka, organisasi dapat mencapai kontrol yang lebih besar atas nasib mereka sendiri dan membangun basis kekuatan yang lebih kuat, membuat mereka kebal terhadap ancaman eksternal yang menimbulkan saling ketergantungan sumber daya. Saling ketergantungan ini adalah akibat dari keterbatasan para aktor ini. Interaksi ini memiliki tingkat otonomi tertentu, yang berarti tidak ada satu aktor pun yang memiliki kapasitas untuk mengatur dan menentukan tindakan strategis aktor lain.

Informasi mungkin beragam, kontradiktif, atau sulit dipahami, yang dapat menyebabkan kelebihan informasi dan pengungkapan kebenaran yang kontradiktif (Klijn and Koppenjan 2014). Satu-satunya cara untuk memastikan kelangsungan hidup suatu organisasi adalah dengan mengamankan tingkat independensi sebesar mungkin dari pemangku kepentingan yang selalu berubah. Untuk mengakomodir nilai kepentingan, perlu melibatkan aktor dari luar pemerintah melalui jaringan (Kapucu 2014). Dalam perspektif jaringan, pemerintah bukan lagi satu-satunya pemain. Pemerintah harus mampu menciptakan jaringan pemangku kepentingan dalam setiap aspek pembuatan kebijakan publik. Pelaku yang relevan dapat berupa individu atau organisasi (organisasi).

Ketika organisasi bersaing untuk mendapatkan dukungan, mereka mencari prestise sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan tanpa meningkatkan saling ketergantungan mereka. Ada banyak strategi yang tersedia bagi organisasi untuk mengurangi ketergantungan sumber daya, mulai dari reorganisasi internal hingga perekrutan anggota dewan eksternal (Mellquist 2022). Diakui secara luas bahwa kemampuan organisasi untuk menavigasi dinamika lingkungan operasi mereka adalah

salah satu kemampuan organisasi kunci yang menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan.

Teori organisasi dan penelitian strategi mengakui bahwa organisasi harus mengidentifikasi, membentuk, dan mengendalikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan pertumbuhan mereka. Meskipun teori ketergantungan sumber daya telah sangat berpengaruh dalam mengeksplorasi banyak cara kerentanan sumber daya dapat dikurangi atau diatasi di lingkungan mereka, fokus ketergantungan sumber daya telah pada aktor kekuatan tinggi (perusahaan besar, perusahaan kaya sumber daya, asosiasi industri yang kuat, dan kekuatan politik di perusahaan yang sangat diberkati) (Demiral and Demiral 2021). Sulit bagi masyarakat untuk mengurangi atau menghilangkan legitimasi organisasi yang kuat.

Penting di antara strategi akuisisi sumber daya ini adalah aktivitas yang memodifikasi pola pertukaran antara organisasi dan pemangku kepentingan lingkungan utamanya. Karena organisasi adalah sistem terbuka yang terdiri dari koalisi eksternal dan internal, pola jaringan manajerial eksternal dengan pemangku kepentingan utama kemungkinan akan memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan relatif dari interaksi organisasi dengan lingkungannya. Ketika batas-batas antara organisasi dan pemangku kepentingan mereka menjadi semakin kabur di sektor publik dan bentuk jaringan tata kelola dan pemberian layanan menjadi semakin penting, kebutuhan untuk mengelola ketergantungan lingkungan semakin penting (Wilson, Rose, and Fish 2022).

Tingkat kepercayaan antara masing-masing aktor yang terlibat akan berpengaruh pada kerjasama mereka, yang merupakan elemen penting lainnya yang diperlukan untuk melengkapi teori ketergantungan sumber daya dan jaringan (Sopia Rukmana S, Alwi, and Susanti 2019). Sebuah organisasi jaringan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi akan memiliki kerjasama yang lebih banyak dan lebih baik daripada organisasi dengan tingkat kepercayaan yang rendah. Konsekuensi lain dari pengaruh Trust adalah dalam proses interaksi para aktor akan lebih banyak bertukar informasi sehingga memungkinkan untuk menemukan solusi yang lebih inovatif, dan tingkat kepercayaan yang tinggi akan menciptakan hasil yang lebih memuaskan dari proses pengambilan keputusan yang kompleks dalam organisasi jaringan (Alwi and Susanti 2020).

Selain mengelola pemberian layanan, menerapkan kebijakan nasional, dan menanggapi tuntutan pengguna layanan dan warga negara, manajer layanan publik kini mencurahkan lebih banyak waktu untuk terlibat dengan aktor di organisasi pemberian layanan lain di sektor publik, swasta, dan sukarela (Swade, Köchling, and Posch 2021). Dengan demikian, keterampilan dan perilaku manajerial yang diperlukan untuk memastikan layanan publik secara efektif mengelola lingkungan pemangku kepentingan mereka juga telah berkembang, dengan harapan bahwa manajer jaringan yang lebih baik akan dapat menuai manfaat dari dukungan pemangku kepentingan yang lebih besar untuk keputusan strategis dan operasional mereka.

Meningkatnya ketergantungan pada model jaringan tata kelola dan pemberian layanan menempatkan penekanan besar pada kemampuan manajer publik untuk menumbuhkan hubungan kolaboratif dengan berbagai aktor penting untuk mengakses sumber daya utama waktu, uang, dan legitimasi (Agranoff and McGuire 2003). Ada kemungkinan bahwa jenis jaringan yang berbeda terkait dengan tingkat dukungan pemangku kepentingan yang berbeda, dan ini adalah hasil dari logika berbeda yang mengatur intensitas interaksi manajer dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan.

Mengkaji persoalan pelayanan publik di Indonesia dapat dilihat pada berbagai titik dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti awal masa orde baru dan masa reformasi terkini. Pergeseran paradigma dalam pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari perubahan lingkungan politik, yang berdampak pada kemampuan pemerintah untuk membuat dan menjalankan kebijakan. Selama Orde di Indonesia Pelayanan publik, misalnya, dicirikan oleh dominasi negara atas berbagai aspek kehidupan bangsa, sehingga memunculkan istilah “paradigma negara” untuk negara yang kuat atau otonom di mana kekuatan sosial politik, termasuk kekuatan pasar kecil, memiliki pengaruh terhadap publik. kebijakan dan bahkan implementasinya. Paradigma deregulasi setengah hati yang melihat pemerintah mengurangi regulasi menjadi hal yang lumrah di era reformasi. Pemerintah memilih industri tertentu untuk deregulasi yang tujuan utamanya bukanlah peningkatan efektivitas pelayanan publik melainkan perlindungan hubungan bisnis antara pejabat pemerintah dan pengusaha yang kuat. paradigma reformasi sektor publik. Paradigma ini mengkaji ulang dan mendefinisikan kembali fungsi pemerintah dalam konteksnya, termasuk perubahan dalam lanskap ekonomi dan politik global, perkembangan masyarakat sipil, tata pemerintahan yang baik, dan semakin besarnya pengaruh pasar dan masyarakat dalam penciptaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Diakui secara luas bahwa kemampuan organisasi untuk menavigasi dinamika lingkungan operasi mereka adalah salah satu kemampuan organisasi kunci yang menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan. Teori organisasi dan penelitian strategi mengakui bahwa penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi, membentuk, dan mengendalikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan pertumbuhan mereka, termasuk literatur ekstensif tentang menemukan kesesuaian yang baik antara organisasi dan lingkungan kelembagaan dan kompetitif mereka untuk mengatasi dan mengurangi dampak ketidakpastian lingkungan. Studi ini mengkaji dampak dari berbagai jenis jaringan manajerial pada tingkat dukungan pemangku kepentingan untuk organisasi layanan publik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada teori atau model yang dijadikan rujukan dalam pengumpulan data, yang selanjutnya diverifikasi atau dikonfirmasi dengan data lapangan. Fokus penelitian ini adalah kompleksitas dalam governance network yang

dijelaskan dari Struktur dalam organisasi dan Koordinasi dalam jaringan. Struktur dalam organisasi jaringan adalah pola interaksi antar dalam organisasi jaringan yang tidak hanya menjadi ciri dari organisasi jaringan tetapi juga mempengaruhi cara kerja dan mekanisme kerja aktor dalam organisasi jaringan. Ketersediaan sumber daya, ketersediaan sumber daya adalah tersedianya sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor-aktor dalam organisasi jaringan.

Pada bagian pertama dari artikel ini, penulis menerapkan ketergantungan sumber daya dan teori institusional pada perilaku manajer dalam pengaturan jaringan yang kompleks di sektor publik. Dalam melakukannya, kami mengembangkan beberapa harapan luas tentang kemungkinan pola jaringan manajerial dalam organisasi layanan publik, dan kemungkinan hubungan antara pola-pola ini dan tingkat dukungan yang mungkin diperoleh manajer dari kelompok pemangku kepentingan utama. Data dan metode yang kami gunakan untuk mengeksplorasi perilaku jaringan di antara pejabat pemerintah daerah dan dukungan pemangku kepentingan yang mereka alami kemudian dijelaskan. Setelah itu, bukti yang diambil dari *analisis clustering fuzzy* disajikan pada pola jaringan manajerial, dan fungsi keanggotaan cluster dimasukkan dalam model regresi multivariat memeriksa faktor-faktor penentu dukungan pemangku kepentingan yang dirasakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaringan di Organisasi Layanan Publik

Pergeseran ke arah organisasi kebijakan dan layanan berbasis tata kelola di sektor publik telah meningkatkan minat pada jaringan manajerial (Torenvlied et al. 2013). Dalam upaya untuk mengurangi dampak ketergantungan sumber daya pada keputusan strategis dan operasional, jaringan biasanya menggabungkan hubungan struktural formal yang diwujudkan dalam jaringan dan perilaku aktual manajer individu (Vega-Redondo 2013). Biasanya, tujuan dari aktivitas jaringan ini dalam organisasi pemberian layanan adalah untuk menciptakan ruang relasional yang diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Penelitian ini berfokus pada peran perilaku pengelola organisasi layanan publik lokal.

Menurut teori ketergantungan sumber daya, perilaku jaringan manajer biasanya merupakan hasil dari upaya mereka untuk mempengaruhi atau melibatkan pemangku kepentingan lingkungan organisasi yang berpengaruh (Fraczkiewicz-Wronka and Szymaniec 2012). Organisasi publik harus menangani dan menanggapi tuntutan pemangku kepentingan yang sering bertentangan, termasuk politisi, pembuat kebijakan, perwakilan sektor swasta, dan sukarelawan (Yastrebova et al. 2020). Administrator pemerintah daerah yang mengejar kemandirian sumber daya melalui tindakan dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan eksternal kemungkinan akan mengejar salah satu dari tiga strategi utama (Phoek, Tjilen, and Ririhena 2019).

Pertama, mungkin menekankan pada jaringan untuk memperoleh sumber daya keuangan, manusia, dan intelektual yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik lokal. Di satu sisi, ini dapat dicapai dengan

secara proaktif menarik mitra untuk menghasilkan layanan bersama, seperti sektor publik lokal lainnya dan lembaga sukarela untuk mengatasi masalah kejahatan seperti gangguan kaum muda atau bisnis lokal untuk membangun dukungan bagi rencana pembangunan ekonomi (Andrews and Boyne 2014). Selain itu, mungkin perlu mencari saran, arahan, dan bantuan tambahan dari badan pengatur yang bertugas memastikan bahwa pemerintah daerah dapat memenuhi standar layanan nasional (Döring 2021).

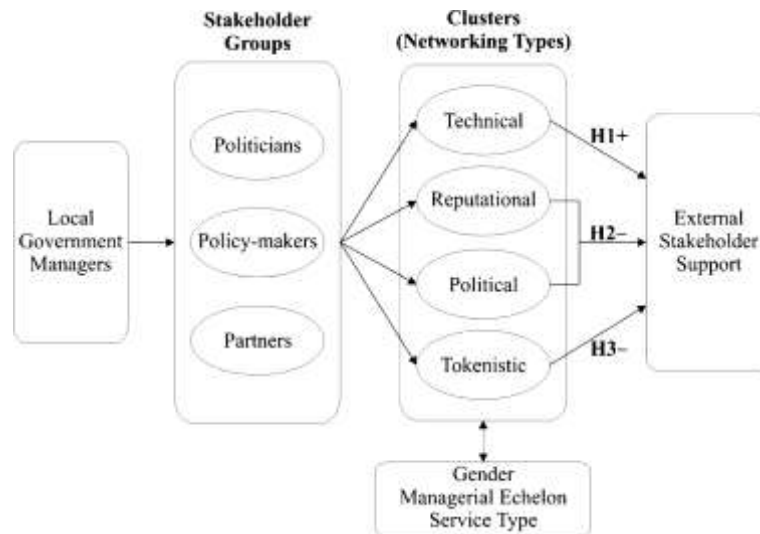
Didukung oleh apa yang disebut oleh para ahli teori institusi sebagai logika konsekuensi, yaitu tindakan yang diperhitungkan untuk menghasilkan manfaat paling besar bagi organisasi, jaringan ini terutama dibuat untuk alasan teknis untuk membantu manajer melaksanakan tanggung jawab layanan mereka dengan lebih baik (Entwistle 2011). Kedua, jaringan manajerial lokal dapat menekankan keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan yang lebih tinggi dalam hierarki politik. Pola jaringan ini memerlukan pembangunan dukungan di antara politisi dan pembuat kebijakan untuk keputusan strategis dan operasional yang disukai, sehingga memastikan bahwa aktor politik memandang keputusan tersebut sebagai benar (Tardiyo 2020).

Sementara manajer dapat secara aktif mencari persetujuan politisi dan pembuat kebijakan, manajer juga bertanggung jawab atas interaksi yang diprakarsai oleh kelompok pemangku kepentingan ini. tindakan yang mereka anggap tepat (Walker 2013). Manajer yang menghabiskan lebih banyak waktu berjejaring dengan politisi dan pembuat kebijakan biasanya memiliki pemahaman yang tajam tentang bagaimana aktor ini memandang reputasi organisasi mereka (Carpenter and Krause 2012). Oleh karena itu, jaringan untuk tujuan reputasi terutama dilakukan untuk tujuan membangun dan mempertahankan legitimasi eksternal organisasi, yang dibentuk oleh apa yang disebut oleh ahli teori institusi sebagai "logika kesesuaian" tindakan yang dilakukan karena dianggap menetapkan jenis yang sesuai.

Ketiga, jaringan manajer publik dapat ditentukan semata-mata oleh kondisi lokal. Manajer pemerintah daerah mungkin diminta untuk mencurahkan waktu untuk harapan pejabat terpilih lokal, baik karena politisi mempertanyakan keputusan strategis dan operasional yang dibuat oleh kelompok penguasa atau karena kelompok penguasa itu sendiri membutuhkan persuasi (Entwistle 2011). Semua ini menunjukkan bahwa jenis jaringan ini secara inheren bersifat politis, tetapi juga dipandu oleh 'logika kepatutan', meskipun lebih banyak dibentuk oleh nilai dan norma lokal daripada tingkat regional atau nasional (Tjilen, Lekatompessy, and Maturbongs 2021).

Tujuan dari jaringan manajerial, mungkin sepenuhnya didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hubungan kolaboratif untuk mengembangkan, mengatur, dan menyusun hubungan dengan aktor dan lembaga yang berbeda (Andrews 2017). Oleh karena itu, pimpinan organisasi yang memfokuskan upaya jaringan mereka pada pembuat kebijakan di pemerintah mungkin melakukannya semata-mata untuk tujuan

formalitas, tanpa tujuan yang lebih luas untuk mendapatkan reputasi atau politik, apalagi keuntungan teknis bagi organisasi.



Gbr. 1 Model konseptual adaptasi dari (Andrews and Boyne 2014)

Jaringan Manajerial

Survei dari mana ukuran perilaku jaringan kami berasal mengeksplorasi persepsi, kinerja, dan variabel latar belakang informan manajemen. Survei ini bertujuan untuk memeriksa perilaku jaringan seperti yang dilaporkan. Interaksi pejabat pemerintah daerah dengan tujuh kelompok pemangku kepentingan lingkungan yang signifikan (Torenvlied et al. 2013). Kategori pertama terdiri dari politisi, beberapa di antaranya terkait erat dengan pemerintah daerah (pejabat terpilih) dan lainnya dengan pemerintah pusat. Kepedulian untuk memastikan bahwa penyedia layanan responsif terhadap tuntutan akuntabilitas demokratis menyatukan pihak-pihak ini. Seperti di tingkat nasional, anggota terpilih berbeda dari birokrasi formal dan mewakili pandangan warga lokal tentang masalah pemberian layanan di tingkat lokal.

Selain itu, responden ditanyai mengenai dua kelompok kunci aktor nasional yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan publik dilayani: penyedia layanan publik, pejabat pemerintah pusat, dan perwakilan badan pengatur. Para pembuat kebijakan ini lebih mungkin secara geografis terpisah dari pemerintah daerah langsung daripada kelompok pemangku kepentingan lainnya, sehingga para manajer mungkin lebih jarang berinteraksi dengan mereka dibandingkan dengan kelompok pemangku kepentingan lainnya (Malama et al. 2021).

Pemeran terakhir terdiri dari individu yang mewakili mitra produksi layanan potensial. Terlepas dari kenyataan bahwa "mitra" ini mungkin terutama peduli dengan pemberian layanan, mereka sering kali juga melayani kepentingan yang lebih luas. celana dalam. Misalnya, pemimpin bisnis lokal dapat memainkan peran kepemimpinan sipil, sukarela. Organisasi dapat bertindak sebagai kelompok penekan, dan lembaga publik lainnya memegang mandat penting untuk inisiatif kebijakan

tertentu. Terlepas dari kenyataan bahwa "mitra" ini mungkin terutama peduli dengan pemberian layanan, mereka sering juga mengakomodasi permintaan yang lebih luas. Misalnya, pemimpin bisnis lokal dapat bertindak sebagai pemimpin sipil, organisasi nirlaba dapat bertindak sebagai kelompok lobi, dan lembaga publik lainnya dapat memegang tanggung jawab utama untuk inisiatif kebijakan tertentu.

Terlepas dari kenyataan bahwa 'mitra' mungkin terutama peduli dengan pemberian layanan, mereka sering mengakomodasi brief yang lebih luas. Misalnya, pemimpin bisnis lokal dapat bertindak sebagai pemimpin sipil, organisasi nirlaba dapat bertindak sebagai kelompok lobi, dan lembaga publik lainnya dapat memegang tanggung jawab utama untuk inisiatif kebijakan tertentu. Teori ketergantungan sumber daya adalah salah satu aliran pemikiran studi organisasi yang paling berpengaruh (Hillman, Withers, and Collins 2009). Namun, relatif sedikit penelitian yang secara sistematis meneliti keberhasilan relatif dari strategi untuk mengurangi ketergantungan sumber daya atau mendapatkan dukungan pemangku kepentingan di antara manajer layanan publik.

Kami mengusulkan, menggunakan teori institusional sebagai landasan, bahwa perluasan jaringan, meskipun memberikan tes baru teori ketergantungan sumber daya di sektor publik, tidak sepenuhnya menghilangkan efek kausal dari perubahan perilaku jaringan dan dukungan pemangku kepentingan. Data panel yang menggabungkan informasi tentang perilaku jaringan dan tingkat dukungan pemangku kepentingan tidak diragukan lagi akan memungkinkan pemeriksaan lebih dalam tentang hubungan mereka (Stocker et al. 2019). Selain itu, kami mengandalkan persepsi manajer untuk menguji hipotesis kami, tetapi dimungkinkan untuk menggunakan sumber data lain untuk menyelidiki pola perilaku jaringan, seperti notulen rapat antara manajer dan pemangku kepentingan, dan untuk mengembangkan ukuran ketergantungan sumber daya yang secara langsung menangkap sumber daya yang dapat dibagi. oleh kelompok pemangku kepentingan bekerja sama dengan organisasi layanan publik.

Saran untuk teori *network governance network* dapat ditambahkan sebagai berikut (Klijn and Koppenjan 2012):

1. Struktur dalam organisasi jaringan merupakan pola interaksi antara orang-orang dalam suatu organisasi jaringan yang tidak hanya mencirikan suatu organisasi jaringan tetapi juga mempengaruhi cara kerja dan mekanisme aktor-aktor dalam suatu organisasi jaringan. Untuk melihat struktur dalam jaringan ada 4 sub dimensi yaitu :
 - a. Kontak, merupakan ikatan sosial antara masing-masing aktor dilihat dari kedekatan hubungan tersebut. Hal ini dapat digambarkan dari apa kontribusi masing-masing aktor yang terlibat dalam organisasi jaringan, berapa lama durasi interaksi antar aktor dan utilitas apa yang diperoleh kelompok sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan.
 - b. Kepercayaan dalam jaringan organisasi kebijakan adalah tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh setiap aktor dalam jaringan organisasi. Kepercayaan pada organisasi jaringan dapat diukur melalui:

- a) Kepercayaan pada perjanjian (agreement trust); semua aktor yang terlibat dalam organisasi jaringan ketahanan pangan memiliki keyakinan untuk melaksanakan program sesuai dengan kontrak yang disepakati.
 - b) Manfaat dari keragu-raguan tersebut adalah semua aktor yang terlibat dalam organisasi jaringan ketahanan pangan saling mengingatkan kegagalan program.
 - c) Keandalan (reliability); semua aktor yang terlibat dalam kebijakan ketahanan pangan sepakat dan melaksanakan program secara bersama-sama.
 - d) Tidak adanya perilaku oportunistik (absence of opportunistic behavior); Tidak ada aktor dalam organisasi jaringan ketahanan pangan yang ingin mengambil keuntungan sendiri dan merugikan aktor lain.
 - e) Percaya pada niat baik, kepercayaan semua aktor dalam makanandewan keamanan mampu menghasilkan program yang baik dan dapat memecahkan masalah.
- c. Berbagi Informasi (Information Sharing), berbagi informasi yang efektif adalah yang memenuhi 2 syarat, yaitu keluasan informasi dan kualitas informasi.
- a) Area informasi meliputi: ruang lingkup informasi yang diberikan oleh masing-masing aktor dalam jaringan implementasi kebijakan
 - b) Kualitas informasi; informasi yang diberikan oleh para pelaku dalam jaringan kebijakan ketahanan pangan tepat waktu dan lengkap.
- d. Pertukaran sumber daya, termasuk ketersediaan sumber daya dan kecukupan sumber daya. Ketersediaan sumber daya adalah ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap aktor dalam organisasi jaringan ketahanan pangan yang akan ditukarkan dengan sumber daya yang relevan. Sedangkan resource adequacy merupakan persyaratan untuk memenuhi pertukaran sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor dalam jaringan organisasi agar pertukaran sumber daya dapat berjalan efektif.
2. Koordinasi antar aktor dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan. Dilihat dari bagaimana jenis koordinasi yang ada dalam jaringan organisasi.

Menurut perspektif yang dibangun, organisasi bergantung pada sumber daya eksternal (e.g. Salancik and Pfeffer 1978; Zoogah 2011). Dimungkinkan untuk mengurangi ketergantungan ini melalui aksi politik dalam berbagai cara. Hal ini dilakukan sesuai dengan model politik yang secara eksplisit mengutamakan hubungan antar organisasi daripada intra organisasi. Beberapa strategi hubungan saling ketergantungan umum yang digariskan oleh teori ini meliputi:

1. Tawar-menawar

Ini adalah langkah awal strategi dan sering kali mencerminkan batasan dan pertahanan wilayah organisasi (e.g. Scott 1983; McLaughlin and London 2013). Ini mungkin juga melibatkan kegiatan seperti penciptaan alternatif untuk sumber kritis.

Namun demikian, transaksi sering melibatkan negosiasi antara dua pihak (e.g.Katz 1978;Staw 2016). Perilaku penawaran setiap individu diatur oleh aturan hubungan kepercayaan mereka dengan organisasi eksternal dan anggota internal.

2. Kesepakatan atau Kontrak

Perjanjian melibatkan negosiasi perjanjian pertukaran kinerja di masa depan. Mereka mengantisipasi bahwa koordinasi masa depan dengan organisasi lain akan mengurangi ketidakpastian organisasi. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa kontrak masih mengandung ambiguitas yang melekat, mereka berfungsi untuk membedakan hubungan para pihak. Selain itu, hukum semu sering membuka jalan untuk negosiasi ulang dan penawaran berikutnya (e.g.Williamson 1975;Muradian and Rival 2012). Memperluas argumen untuk organisasi bahwa jika kapasitas dukungan seimbang dengan permintaan terpusat, organisasi yang bersangkutan akan berusaha mengurangi ketergantungannya melalui kontrak

(e.g.Selznick 1949;Ekbladh 2002) pertama kali mendefinisikan kooptasi sebagai badan perwakilan dari kelompok eksternal yang biasanya mencakup perwakilan dari lembaga keuangan di dewan direksi perusahaan untuk pengambilan keputusan internal atau struktur penasehat. Belajar tentang kepemimpinan sering kali menekankan pemaksaan. Perjanjian yang ada biasanya membangun hubungan dengan aspek-aspek penting dari lingkungan tempat mereka bergantung. Ini dirancang untuk memastikan bahwa organisasi menerima sumber daya yang signifikan selama perjanjian kerja sama. Metode partisipasi lebih mengikat daripada kontrak karena peserta dapat mempertanyakan atau mempengaruhi berbagai aspek organisasi (Phoek, Tjilen, and Cahyono 2021).

3. Kooptasi di lembaga umum dan organisasi nirlaba.

Banyak program federal diwakili secara local (e.g.Scott 1983;(McLaughlin and London 2013). Strategi ini terbalik ketika pendapatan lokal mengalahkan tujuan federal. Berdasarkan premis ini, Selznick berpendapat bahwa jika dukungan terpusat tetapi permintaan tersebar, organisasi yang lebih lemah akan berusaha mengatasi ketergantungannya dengan mengkooptasi.

4. Perjanjian Hirarki .

Mengidentifikasi jenis strategi baru yang dimasukkan ke dalam rencana untuk mengendalikan hubungan otoritas (e.g.Stinchombe and dos Santos 1985;(Del Campo and Sengupta 2015). Biasanya pada titik kompleksitas tinggi dan saling ketergantungan yang tidak jelas (seperti perjanjian pertahanan dan keamanan antara kontraktor dan pemerintah). Perjanjian tersebut bertindak sebagai saluran untuk hak pengawasan atas mitra pertukaran yang biasanya akan berimplikasi pada pengambilan keputusan internal. Dengan demikian, hak hierarkis mendukung kebebasan kontraktor, yang dipandang sebagai bentuk kemitraan pemerintah. Biasanya dilakukan pada proyek besar dan berisiko tinggi, seperti proyek konstruksi dan pertahanan besar.

5. Usaha Bersama

Dalam usaha patungan, dua atau lebih perusahaan membuat organisasi baru untuk mengejar tujuan bersama, meskipun memiliki lebih sedikit sumber daya yang tersedia dan memperoleh lebih sedikit aset daripada ketika mereka bergabung. Mungkin ada usaha patungan atau mitra pertukaran antara pesaing. Ini lebih sering terjadi dalam organisasi yang ditandai dengan persaingan yang ketat dan hubungan yang berumur pendek. Usaha patungan dapat dibentuk untuk kegiatan seperti penelitian dan pengembangan (R&D) dan kontrol kualitas, yang menguntungkan untuk mengimbangi kelemahan masing-masing perusahaan.

6. Penggabungan

Beberapa organisasi digabung menjadi satu entitas selama merger. Ada tiga jenis merger: a.integrasi vertikal Dalam industri yang sama, organisasi pada berbagai tahap produksi dengan hubungan yang saling menguntungkan bergabung. Ini lebih umum di antara organisasi yang ingin memberikan pengaruh timbal balik (Pfeffer 1972). Struktur organisasi yang identik digabungkan dengan struktur organisasi yang lebih besar. Ini terjadi ketika persaingan di antara bisnis-bisnis ini sangat ketat.

7. Kemitraan Pemerintah Swasta (Publik Privat Partnership/ PPP)

Melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui investasi, PPP merupakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi dalam proses pelaksanaan pembangunan. Peran dan fungsi pemerintah sebagai lembaga resmi harus lebih transparan, akuntabel, dan responsif. efektif dan efisien dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik. Tentunya dalam hal ini tidak lepas dari fungsi Pemerintah pengawasan pihak swasta yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan pihak swasta yang mampu memberikan pembiayaan dan tenaga ahli setidaknya membantu fungsi Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Selain itu, melalui PPP juga menciptakan sistem pemerintahan yang bersih karena dalam hal ini Pemerintah juga dapat menjalankan fungsi kontrol dari pihak swasta yang terlibat (Phoek et al. 2019).

8. Asosiasi.

Organisasi memerlukan bisnis lain untuk membentuk tautan atau jaringan dengan operasi fundamental mereka. Konglomerasi adalah bentuk diversifikasi tertinggi. Merger, yang biasanya terjadi antara organisasi dengan tingkat dan sejarah yang berbeda, adalah bentuk lain (e.g.Chandler 1990;(Colli and Vasta 2015). Biaya transaksi integrasi vertikal dapat digunakan untuk menjelaskan pendekatan ketergantungan sumber daya melalui diversifikasi. Ketika persyaratan aset perusahaan menjadi lebih spesifik, ia akan memilih untuk memproduksi aset superiornya untuk mengurangi ketergantungannya pada sejumlah pemasok yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi komparatif yang kompetitif layak sebagai akibat dari faktor keputusan bersama.

Connection Association adalah sekelompok organisasi yang sepakat untuk menyelenggarakan berbagai bentuk perizinan untuk kepentingan masing-masing.

Secara kolektif, mereka mengejar tujuan mereka secara menguntungkan. Tergantung pada tujuan asosiasi, anggota mungkin setara atau tidak setara. Organisasi individu bergabung dengan asosiasi untuk mendapatkan akses ke sumber daya, data, pengaruh, atau legitimasi dan penerimaan.

Pemerintah memberikan pengaruh atas organisasi dengan menentukan jenis bisnis dan organisasi yang diizinkan. Pemerintah memiliki tingkat kontrol yang berbeda-beda atas suatu organisasi, meskipun kemampuan organisasi tersebut untuk memberikan pengaruh demografis dan pengambilan keputusan yang lebih besar daripada pemerintah (Tjilen et al. 2021). Namun, lembaga pemerintah dapat menggunakan berbagai tingkat pemantauan dan memberlakukan undang-undang pada organisasi yang melarang pengambilan risiko. secara administratif (perlindungan lingkungan, pilih kasih, pembatasan persaingan, penetapan harga dan manfaat, dll.). Ketika pemerintah menjalankan otoritas atas organisasi, mereka memberikan keringanan pajak, insentif, dan subsidi kepada pembeli produk dan layanan mitra.

KESIMPULAN

Dalam perspektif jaringan, pemerintah bukan lagi satu-satunya pemain. Pemerintah harus mampu menciptakan jaringan pemangku kepentingan dalam setiap aspek pembuatan kebijakan publik. Ketika organisasi bersaing untuk mendapatkan dukungan, mereka mencari prestise sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan tanpa meningkatkan saling ketergantungan mereka. Ada berbagai strategi yang tersedia bagi organisasi untuk mengurangi ketergantungan mereka pada sumber daya, mulai dari reorganisasi internal hingga perekrutan anggota dewan eksternal.

Teori organisasi dan penelitian strategi mengakui bahwa penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi, membentuk, dan mengendalikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan pertumbuhan mereka, termasuk literatur ekstensif tentang menemukan kecocokan antara organisasi dan lingkungan kelembagaan dan kompetitif mereka untuk mengatasi dan mengurangi efek dari faktor lingkungan ini. ketidakpastian lingkungan. Pola jaringan manajerial eksternal dengan pemangku kepentingan utama cenderung memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan di mana suatu organisasi berinteraksi dengan lingkungannya. dan mengendalikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan pertumbuhan mereka, termasuk literatur ekstensif tentang menemukan kecocokan yang baik antara organisasi dan lingkungan kelembagaan dan kompetitif mereka untuk mengatasi dan meminimalkan dampak ketidakpastian lingkungan. Pola jaringan manajerial eksternal dengan pemangku kepentingan utama cenderung memainkan peran besar dalam menentukan kebijakan pemerintah. Diperlukan forum sebagai platform komunikasi untuk mencapai sinkronisasi, kolaborasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan kontak pemangku kepentingan yang lebih besar dan integrasi pelaksanaan program manajemen.

DAFTAR PUSTAKA:

- Agranoff, Robert, and Michael McGuire. 2003. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Georgetown University Press.
- Alwi, A., and G. Susanti. 2020. "Trust in the Network of Food Diversification Policy Implementation in Bone Regency." *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & ...* 6(2):143–53.
- Andrews, Rhys. 2014. "Performance Management and Public Service Improvement." *The Public Policy Institute for Wales* 3:1–13.
- Andrews, Rhys, and George A. Boyne. 2014. "Task Complexity, Organization Size, and Administrative Intensity: The Case of UK Universities." *Public Administration* 92(3):656–72.
- Del Campo, A., and K. Sengupta. 2015. "Controlling Quantum Critical Dynamics of Isolated Systems." *The European Physical Journal Special Topics* 224(1):189–203.
- Carpenter, Daniel P., and George A. Krause. 2012. "Reputation and Public Administration." *Public Administration Review* 72(1):26–32.
- Chandler, Alfred D. 1990. "The Enduring Logic of Industrial Success." *Harvard Business Review* 68(2):130–40.
- Colli, Andrea, and Michelangelo Vasta. 2015. *The Enduring Logic: The History of Business Groups in Italy*. Department of Economics, University of Siena.
- Demiral, Mehmet, and Özge Demiral. 2021. "Socio-Economic Productive Capacities and Energy Efficiency: Global Evidence by Income Level and Resource Dependence." *Environmental Science and Pollution Research* 1–25.
- Döring, Matthias. 2021. "How-to Bureaucracy: A Concept of Citizens' Administrative Literacy." *Administration & Society* 53(8):1155–77.
- Ekbladh, David. 2002. "'Mr. TVA': Grass-Roots Development, David Lilienthal, and the Rise and Fall of the Tennessee Valley Authority as a Symbol for US Overseas Development, 1933–1973." *Diplomatic History* 26(3):335–74.
- Entwistle, Tom. 2011. "For Appropriateness or Consequences? Explaining Organizational Change in English Local Government." *Public Administration* 89(2):661–80.
- Fraczkiewicz-Wronka, Aldona, and Karolina Szymaniec. 2012. "Resource Based View and Resource Dependence Theory in Decision Making Process of Public Organisation-Research Findings." *Management* 16(2):16.
- Hillman, Amy J., Michael C. Withers, and Brian J. Collins. 2009. "Resource Dependence Theory: A Review." *Journal of Management* 35(6):1404–27. doi: 10.1177/0149206309343469.
- Kapucu, Naim. 2014. "Collaborative Governance and Disaster Recovery: The National Disaster Recovery Framework (NDRF) in the US." Pp. 41–59 in *Disaster recovery*. Springer.
- Katz, Daniel. 1978. *Social Psychology of Organizations*.
- Khaw, Khai Wah, Alhamzah Alnoor, Hadi Al-Abrow, Victor Tiberius, Yuvaraj Ganesan, and Nadia A. Atshan. 2022. "Reactions towards Organizational Change: A Systematic Literature Review." *Current Psychology* 1–24.
- Klijn, Erik-Hans, and Joop Koppenjan. 2012. "Governance Network Theory: Past, Present and Future." *Policy & Politics* 40(4):587–606.
- Klijn, Erik-Hans, and Joop Koppenjan. 2014. "Complexity in Governance Network

- Theory.” *Complexity, Governance & Networks* 1(1):61–70.
- Malama, Annie, Joseph Mumba Zulu, Selestine Nzala, Maureen Mupeta Kombe, and Adam Silumbwe. 2021. “Health Research Knowledge Translation into Policy in Zambia: Policy-Maker and Researcher Perspectives.” *Health Research Policy and Systems* 19(1):1–11.
- McLaughlin, Milbrey, and Rebecca A. London. 2013. “Taking a Societal Sector Perspective on Youth Learning and Development.” *Teachers College Record* 115(14):192–214.
- Mellquist, Joanna. 2022. “Role Orientation and Organizational Strategy among Policy Professionals in Civil Society.” *Interest Groups & Advocacy* 11(1):136–56.
- Muradian, Roldan, and Laura Rival. 2012. “Between Markets and Hierarchies: The Challenge of Governing Ecosystem Services.” *Ecosystem Services* 1(1):93–100.
- Phoek, Inez Cara Alexander, Alexander Phuk Tjilen, and Edi Cahyono. 2021. “Analysis of Ecotourism, Culture and Local Community Empowerment: Case Study of Wasur National Park - Indonesia.” *Macro Management & Public Policies* 3(2):7–13. doi: 10.30564/mmpp.v3i2.3414.
- Phoek, Inez Cara Alexander, Alexander Phuk Tjilen, and Samel Watina Ririhena. 2019. “Public Private Partnership (PPP) Implementation in District Merauke, Papua Province.” *International Journal of Management and Human Science (IJMHS)* 3(4):9–15.
- Salancik, Gerald R., and Jeffrey Pfeffer. 1978. “A Social Information Processing Approach to Job Attitudes and Task Design.” *Administrative Science Quarterly* 224–53.
- Scott, Richard. 1983. “The Organization of Societal Sector.” *Organizational Environments: Ritual and Rationality* 129–53.
- Selznick, Philip. 1949. “TVA and the Grass Roots.”
- Sopia Rukmana S, Novayanti, Alwi Alwi, and Gita Susanti. 2019. “Complexity and Public Policy: Network Model of Food Security Policy Implementation in Bone Regency.” *Iapa Proceedings Conference* 522. doi: 10.30589/proceedings.2019.254.
- Staw, Barry M. 2016. “Stumbling toward a Social Psychology of Organizations: An Autobiographical Look at the Direction of Organizational Research.” *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior* 3(1):1–19.
- Stinchcombe, R. B., and R. R. dos Santos. 1985. “Critical Dynamics of Quantum Chains by Position Space Renormalisation Group.” *Journal of Physics A: Mathematical and General* 18(10):L597.
- Stocker, Fabricio, KEYSA MASCENA, MANUELA CUNHA, A. N. A. CLÁUDIA AZEVEDO, JOÃO BOAVENTURA, and MAURÍCIO GAMA. 2019. “Network Theory of Stakeholder Influences: A Revisited Approach.” *Cadernos Ebape. Br* 17:673–88.
- Swade, Alexander, Gerrit Köchling, and Peter N. Posch. 2021. “Managerial Behavior in Fund Tournaments—the Impact of TrueSkill.” *Journal of Asset Management* 22(1):62–75.
- Tardiyo, Dedy. 2020. “Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dikabupaten Subang.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Volume 7 N:e-ISSN 2614-2945.
- Tjilen, Alexander Phuk, Ransta L. Lekatompessy, and Edoardus E. Maturbongs. 2021. “Reconstruction of the Institutional Pillars.” Pp. 441–47 in *International Joined*

- Conference on Social Science (ICSS 2021)*. Atlantis Press.
- Torenvlied, René, Agnes Akkerman, Kenneth J. Meier, and Laurence J. O’Toole Jr. 2013. “The Multiple Dimensions of Managerial Networking.” *The American Review of Public Administration* 43(3):251–72.
- Vega-Redondo, Fernando. 2013. “Network Organizations.” *Journal of Complex Networks* 1(1):72–82. doi: 10.1093/comnet/cnt002.
- Walker, Richard M. 2013. “Strategic Management and Performance in Public Organizations: Findings from the Miles and Snow Framework.” *Public Administration Review* 73(5):675–85.
- Wiedner, Rene, and Shaz Ansari. 2019. “Collaborative Uncoupling: How to Break up and Stay Together.” in *Managing Inter-organizational Collaborations: Process Views*. Emerald Publishing Limited.
- Williamson, Oliver E. 1975. “Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications: A Study in the Economics of Internal Organization.” *University of Illinois at Urbana-Champaign’s Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship*.
- Wilson, Barbara A., Anita Rose, and Jessica Fish. 2022. “Managing Environmental Dependency Syndrome in a Person with an Acquired Brain Injury: A Simple Strategy Evaluated Using an ABABA Design (Gestión Del Síndrome de Dependencia Ambiental En Un Paciente Con Daño Cerebral Adquirido: Una Estrategia Simple Evalua.” *Studies in Psychology* 43(1):179–90.
- Yastrebova, Anna I., Alexander I. Stakhov, Vladimir M. Redkous, Marina I. Lavitskaya, and Tatyana Y. Suchkova. 2020. “State and Non-State Actors Ensuring Constitutional Order and Public Security: Problems of Legal Regulation of Interaction.” *PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17(10):3424–46.
- Zoogah, David B. 2011. “The Dynamics of Green HRM Behaviors: A Cognitive Social Information Processing Approach.” *German Journal of Human Resource Management* 25(2):117–39.